BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Palembang Pada Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 Tentang Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Istri Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer

1. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa anggota TNI AD aktif yang masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj di Puntang Lahat setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 31960058410474 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai dengan tahun 1999, tahun 2005 mengikuti Diktukareg di Ddodik Latpur Baturaja selesai dilantik pangkat Serda tugas di Yonif 141/AYJP, setelah beberapa kali mutasi kemudian tahun 2008 pindah tugas ke jajaran Korem 043/Gatam, selanjutnya tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0426/TB, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

Bahwa terdakwa dengan saudari R.W adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2010 dalam hubungan suami istri mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang berumur enam tahun dan perempuan yang berumur 3,4 tahun. Rumah tangga terdakwa dan saudari R.W awalnya berjalan harmonis namun mulai tahun 2012 hubungan antara terdakwa dengan saudari R.W sering terjadi pertengkaran atau cekcok mulut dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga

dalam rumah tangga mereka namun masih dapat didamaikan kembali baik oleh tetangga maupun oleh kesatuan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pada pagi hari, terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor milik saudari R.W untuk membeli telur di warung, akan tetapi saudari R.W tidak mau meminjamkan sepeda motornya kemudian terdakwa pergi ke warung bersama kedua anaknya dengan menggunakan sepeda motor milik keponakan terdakwa yang saat itu dititipkan kepada terdakwa. Setelah terdakwa kembali dari warung, terdakwa melihat saudari R.W marah-marah kepada terdakwa sambil berkata kasar, dan berkata lagi “jangan atur hidup saya”, sehingga terjadi pertengkaran atau cekcok mulut antar keduanya, lalu saudari R.W yang dalam hal ini istri dari terdakwa melempar terdakwa dengan TV Led hingga pecah setelah itu saudari R.W berusaha mencakar leher terdakwa tetapi dipegangi oleh terdakwa sehingga terjadi tarik menarik tangan dan pakaian yang menyebabkan luka lebam dilutut kiri saudari R.W akibat kekerasan tumpul yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan terdakwa hanya bajunya yang sobek, kemudian saudari R.W menendang meja selanjutnya saudari R.W keluar dari rumah.

Sebelum terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saudari R.W pada tanggal 24 September 2017, terdakwa pernah dilaporkan oleh saudari R.W kepada atasan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 sehingga oleh Kesatuan Kodim 0426/TB diadakan musyawarah dan saat itu terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap istrinya dan akan memperbaiki hubungan rumah tangga yang baik dengan istrinya.

Faktor penyebab terdakwa sering rebut dengan saudari R.W yaitu masalah ekonomi karena gaji terdakwa perbulannya hanya menerima Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena atas persetujuan istri meminjam uang di bank untuk membeli mobil yang saat ini digunakan terdakwa untuk mencari tambahan diluar jam dinas serta terdakwa merasa ada laki-laki lain yang berhubungan dengan istrinya yaitu pegawai honor ditempat istrinya bekerja. Bahwa antara terdakwa dan saudari R.W sudah tidak tinggal serumah lagi namun terdakwa masih tetap membiayai biaya SPP sekolah anaknya tiap bulan.

2. Alat Bukti Dan Saksi Yang Didatangkan

Alat bukti yang didatangkan dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Satu lembar Visum et Revertum Nomor 353 / 6144 / VII.02 / 4.13 / XI / 2017 tanggal 21 November 2017
2. Satu lembar foto luka gores lutut korban
3. Satu lembar Surat Perjanjian yang dibuat terdakwa tertanggal 12 Juli 2017 di Makodim 0426/TB
4. Satu lembar Surat Pengaduan a/n korban

Adapun saksi yang didatangkan dalam persidangan, antara lain :

1. Anwar Hidayat (tetangga dari terdakwa dan saudari R.W)
2. Inisial R.W (istri dari terdakwa)
3. Dr. Laisa Muliati, MARS (saksi ahli)
4. Pujiyono (tetangga terdakwa)
5. Riani Susilowati (tetangga terdakwa)

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Hakim terlebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Dakwaan Primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum / pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa anggota TNI AD aktif yang masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj di Puntang Lahat setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 31960058410474 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai dengan tahun 1999, tahun 2005 mengikuti Diktukareg di Ddodik Latpur Baturaja selesai dilantik pangkat Serda tugas di Yonif 141/AYJP, setelah beberapa kali mutasi kemudian tahun 2008 pindah tugas ke jajaran Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa benar terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhir atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Bahwa sesuai Skeppera dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2018 tanggal 30 Januari 2018, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Serka J.A NRP 319600058410474, dan terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur *dengan sengaja* ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik

dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri terdakwa.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri, dan anak dalam hal ini ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan antara pelaku atau korban ada hubungan perkawinan atau hubungan antara orang tua dengan anak dan hubungan terhadap orang yang berada dibawah perwalian atau hubungan kerja dan terjadi didalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri sahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa dengan saudari R.W (saksi-2) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2010 dalam hubungan suami istri telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan dan sampai saat ini masih terikat perkawinan.
2. Bahwa benar hubungan rumah tangga terdakwa dengan saksi-2 menjadi tidak harmonis karena terdakwa merasa cemburu dan menuduh saksi-2 selingkuh dengan pegawai honor dikantor saksi-2 dan juga saksi-2 sudah kurang peduli dengan keluarganya karena pulang kantor selalu larut malam dan sampai dirumah hanya main handphone sedangkan yang mengerjakan pekerjaan rumah, memandikan anak dan memasak dilakukan oleh terdakwa serta ada permasalahan ekonomi karena gaji terdakwa tinggal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipotong karena hutang atas kesepakatan berdua.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2017 pada saat saksi-2 sedang duduk-duduk diruang tamu rumah di Asrama Korem 043/Gatam Jl. ZA. Pagaram Nomor 19, Segala Mider Kota Bandar Lampung, kemudian datang terdakwa sambil berdiri dihadapan saksi-2 bermaksud meminjam motor saksi-2, namun saksi-2 menjawab “Kenapa kamu nggak pakai motor kamu saja?”, kemudian terjadi pertengkaran mulut lalu saksi-2 melempar terdakwa dengan TV Led sehingga TV nya pecah setelah itu terjadi tarik menarik tangan dan pakaian serta saksi-2 menendang meja selanjutnya saksi-2 keluar dari dalam rumah.
4. Bahwa benar ketika saksi-2 datang ke rumah saksi-5 dalam keadaan menangis sambil berkata kepada saksi-5 “maaf ibu, tolong saya, saya dipukul”, mendengar hal itu kemudian saksi-5 mempersilahkan saksi-2 masuk kedalam rumah saksi kemudian saksi-5 saat itu diminta untuk melihat dibagian pundak kanannya ada luka lecet atau memar, namun saksi-5 tidak melihatnya, kemudian saksi-2 mengatakan mau melakukan visum ke Rumah Sakit dan saksi-5 menjawab “ya silahkan kalau memang mau visum, biar rumah sakit yang membuktikan ada tidaknya luka”, tidak lama kemudian datang dari pihak keluarga saksi-2 dan terdakwa untuk bermusyawarah setelah pertengkaran reda kemudian mereka kembali ke rumahnya.
5. Bahwa benar pada saat terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi-2 pada hari Minggu tanggal 24 September 2017, tidak ada yang melihat persis kejadiannya tetapi saksi-1, saksi-4, dan saksi-5 yang rumahnya berhadap-hadapan dengan rumah terdakwa hanya mendengar pertengkaran mulut yang sudah biasa terjadi karena istri terdakwa termasuk sifatnya karena sampai melempar terdakwa dengan TV Led hingga pecah.

6. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi-2 terjadi luka gores dibagian lutut kaki kiri sesuai visum dokter RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Nomor : 353/6144/VII.02/4.13/XI/2017 tanggal 21 November 2017 dengan kesimpulan luka lecet pada lutut kiri ukuran lima centi meter kali nol koma lima centi meter akibat kekerasan tumpul dan terdakwa hanya bajunya yang sobek.
7. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi-2 hal tersebut tidak menimbulkan jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan saksi-2 baik dalam bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, tidak terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan subsidair.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a

Unsur Ketiga : Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” telah terbukti dalam dakwaan primair unsur kesatu, oleh karena itu Majelis tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur *dengan sengaja* ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri terdakwa.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri, dan anak dalam hal ini ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan antara pelaku atau korban ada hubungan perkawinan atau hubungan antara orang tua dengan anak dan

hubungan terhadap orang yang berada dibawah perwalian atau hubungan kerja dan terjadi didalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri sahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa dengan saudari R.W (saksi-2) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2010 dalam hubungan suami istri telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan dan sampai saat ini masih terikat perkawinan.
2. Bahwa benar hubungan rumah tangga terdakwa dengan saksi-2 menjadi tidak harmonis karena terdakwa merasa cemburu dan menuduh saksi-2 selingkuh dengan pegawai honor dikantor saksi-2 dan juga saksi-2 sudah kurang peduli dengan keluarganya karena pulang kantor selalu larut malam dan sampai dirumah hanya main handphone sedangkan yang mengerjakan pekerjaan rumah, memandikan anak dan memasak dilakukan oleh terdakwa serta ada permasalahan ekonomi karena gaji terdakwa tinggal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipotong karena hutang atas kesepakatan berdua.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2017 pada saat saksi-2 sedang duduk-duduk diruang tamu rumah di Asrama Korem 043/Gatam Jl. ZA. Pagaralam Nomor 19, Segala Mider Kota Bandar Lampung, kemudian datang terdakwa sambil berdiri dihadapan saksi-2 bermaksud meminjam motor saksi-2, namun saksi-2 menjawab “Kenapa kamu nggak pakai motor kamu saja?”, kemudian terjadi pertengkaran mulut lalu saksi-2 melempar terdakwa dengan TV Led

sehingga TV nya pecah setelah itu terjadi tarik menarik tangan dan pakaian serta saksi-2 menendang meja selanjutnya saksi-2 keluar dari dalam rumah.

4. Bahwa benar ketika saksi-2 datang ke rumah saksi-5 dalam keadaan menangis sambil berkata kepada saksi-5 “maaf ibu, tolong saya, saya dipukul”, mendengar hal itu kemudian saksi-5 mempersilahkan saksi-2 masuk kedalam rumah saksi kemudian saksi-5 saat itu diminta untuk melihat dibagian pundak kanannya ada luka lecet atau memar, namun saksi-5 tidak melihatnya, kemudian saksi-2 mengatakan mau melakukan visum ke Rumah Sakit dan saksi-5 menjawab “ya silahkan kalau memang mau visum, biar rumah sakit yang membuktikan ada tidaknya luka”, tidak lama kemudian datang dari pihak keluarga saksi-2 dan terdakwa untuk bermusyawarah setelah pertengkaran reda kemudian mereka kembali ke rumahnya.
5. Bahwa benar pada saat terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi-2 pada hari Minggu tanggal 24 September 2017, tidak ada yang melihat persis kejadiannya tetapi saksi-1, saksi-4, dan saksi-5 yang rumahnya berhadap-hadapan dengan rumah terdakwa hanya mendengar pertengkaran mulut yang sudah biasa terjadi karena istri terdakwa termasuk sifatnya karena sampai melempar terdakwa dengan TV Led hingga pecah.
6. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi-2 terjadi luka gores dibagian lutut kaki kiri sesuai visum dokter RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Nomor : 353/6144/VII.02/4.13/XI/2017 tanggal 21 November 2017 dengan kesimpulan luka lecet pada lutut kiri ukuran lima centi meter kali nol koma lima centi meter akibat kekerasan tumpul dan terdakwa hanya bajunya yang sobek.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif sebagai akibat dari perbuatan terdakwa sehingga apabila salah satu alternatif telah terbukti maka unsur inipun telah terbukti.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi-2 antara terdakwa dan saksi-2 masih terkait hubungan suami istri dan belum bercerai.
2. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi-2 terjadi luka gores dibagian lutut kaki kiri sesuai visum dokter RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Nomor : 353/6144/VII.02/4.13/XI/2017 tanggal 21 November 2017 dengan kesimpulan luka lecet pada lutut kiri ukuran lima centi meter kali nol koma lima centi meter akibat kekerasan tumpul sedangkan terdakwa bajunya sobek.
3. Bahwa benar sesuai keterangan saksi-2 dan saksi-3 sendiri dipersidangan bahwa luka gores yang dialami oleh saksi-2 tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari” telah terpenuhi.

Dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Adapun hal-hal tersebut antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan anak-anaknya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa terdakwa masih ingin membangun rumah tangga kembali dengan saksi-2 mengingat anak-anak yang dilahirkan dan saat ini butuh biaya.
3. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada saksi-2 selaku istrinya.
4. Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini masih memberikan biaya pendidikan bagi kedua anaknya.

MENGADILI

1. Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana atau melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Satu lembar visum et revertum nomor : 353/6144/VII.02/4.13/XI/2017 tanggal 21 November 2017 a/n R.W
 - b. Satu lembar foto luka gores lutut korban
 - c. Satu lembar surat perjanjian yang dibuat terdakwa tertanggal 12 Juli 2017 di Makodim 0426/TB
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Apabila kita telaah pada putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018, terdakwa dijatuhi pidana sesuai pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (bulan),

akan tetapi dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana atau melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Prajurit yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum disiplin dapat dikenakan tindakan dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut :

1. Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap Bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
2. Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
3. Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Atasan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Yang dimaksud Atasan adalah setiap Prajurit ABRI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Prajurit ABRI yang lain. Jadi dalam penegakan hukum disiplin prajurit setiap atasan berhak menjatuhkan tindakan disiplin prajurit. Tindakan yang

dilakukan terhadap Prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi :

1. Tindakan fisik, dan/atau teguran lisan. Mengenai Hukuman Disiplin diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:
Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas :
 - a. Teguran
 - b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
 - c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
2. Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer diatur pemberatan hukuman disiplin sebagai berikut :
 1. Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
 2. Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Negara dalam keadaan bahaya
 - b. Dalam kegiatan operasi militer
 - c. Dalam kesatuan yang disiapsiagakan
 - d. Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.¹

¹ Muhammad Rezi Aditya, 2016, *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL (Studi Putusan PUT/153-K/PM I-04/AL/XI/2011)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, (<http://digalib.unila.ac.id>), Hlm 26, Diterbitkan (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019, pukul 17:00)

Menurut analisa penulis hukuman yang diberikan oleh majelis Hakim Pengadilan Militer sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, mengingat terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya hidup yang harus dipenuhi dari terdakwa sebagai seorang suami. Dengan demikian hukuman tersebut sudah pantas diberikan kepada terdakwa, selain itu diharapkan dengan hukuman tersebut membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak akan melakukan tindak kekerasan fisik lagi terhadap istrinya.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Istri Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Pada Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan - larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud dan takzir. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *takzir*. Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah ialah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau

tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan 'uqubah hudud, qisash, diyat, dan/atau takzir'.²

Para fuqaha sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*, pengertian kata *jinayah* itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan dimaksud dengan kata-kata *jarimah* adalah larangan - larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir". Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata *syara'* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru bisa dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali bila diancam hukuman terhadapnya.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*jarimah*) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal *ajziyah* (bentuk plural) dan bentuk singularnya adalah *jaza*, apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Fuqaha membagi tindak pidana (*jarimah*) terhadap manusia menjadi tiga bagian :

- a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.

² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019), Cet 1, Hlm 1-2

- b. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- c. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang, tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal ataupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad saw adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apapun bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban.

Prinsip kerahmatan dan arti kedzaliman menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kekerasan seseorang terhadap yang lain adalah haram. Sebaliknya, segala tindak ke setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu memberikan ilmu kepada yang tidak berilmu dan seterusnya. Prinsip ini juga menjadi basis bagi ajaran mengenai hubungan suami istri. Karena itu, al-qur'an mengumpamakan keduanya lakasana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi istri, begitu juga sebaliknya istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian yang salah satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang mencederai

prinsip kerahmatan Islam dan konsep pasangan suami istri yang digariskan al-qur'an.³

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-qur'an maupun al-hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*.⁴

Surah An-Nissa Ayat 19 diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik, disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, *“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.”* (Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim).

³ Siti Bidayatul Hidayah, 2013, *Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor. 182/Pid.B/2010/PN.YK)*, Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia, (<http://ejournal.uin-suka.ac.id>), Hlm 457, Diterbitkan (Diakses pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:20)

⁴ Q.S An-Nissa : 19

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik atau memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang *nusyuz* sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah :

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ ٣٤

Artinya : “Akan istri-istri yang kamu khawatir kedurhakaan mereka, berilah nasihat, dan berpisah tidurlah kamu dari mereka, dan pukul lah mereka itu”.⁵

Asbab an-uzul dari ayat ini turun, berkenaan dengan kasus seorang yang memukul istrinya karena berlaku *nusyuz*, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah selanjutnya Rasulullah menetapkan hukuman qishas atas suami tersebut, maka turunlah ayat 114 surat Thaha sebagai teguran kepada Rasulullah karena keputusan yang tidak pas. Maka turunlah ayat An-Nissa ayat 34 ini. Yang mana tanda tanda *nusyuz* perempuan atau istri antara lain :

1. Tidak cepat menjawab suaminya berdasarkan bukan kebiasaan
2. Tidak nyata atau tidak jelas penghormatan kepada suaminya
3. Tidak mendatangi suami kecuali dengan bosan, jemu atau dengan muka yang cemberut
4. Seorang istri yang jika diajak untuk berhubungan intim dia menolak. Akan tetapi kita harus lebih adil melihat alasan istri untuk tidak mau berhubungan. Jika alasannya rasional seperti sedang sakit, kelelahan atau tidak dalam keadaan siap hatinya maka suami tidak berhak untuk memaksakan.

Berdasarkan ayat tersebut juga, sekurangnya ada tiga cara menghadapi istri yang melakukan *nusyuz* yakni pertama menasehati dengan tegas agar ia dapat kembali menjalankan kewajibannya dengan baik sebagi

⁵ Q.S An-Nissa : 34

istri. Disini suami dituntut bijaksana dalam perkataan dan perbuatan, tegas bukan berarti kasar. Kedua berpisah tempat tidur, cara ini baru dilakukan jika cara yang pertama tidak berhasil. Dan yang ketiga jika cara pertama dan kedua tidak bisa membuat istri berubah menjadi taat kepada komitmen bersama dalam membangun rumah tangga, maka jalan terakhir adalah dengan memukulnya. Akan tetapi pemukulan disini tidak bisa diartikan sebagai memukul dengan tangan atau alat secara kasar apalagi sampai melukainya.⁶

Berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis Nabi : *“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima” dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”*.

Berdasarkan hadis tersebut, maka pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir al-Mizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan Q.S. An-Nisa’ ayat 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat fahisyah mubayyinah. *Fahisyah* biasanya digunakan dalam al-Qur’an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah*” dari kata bayyana, sama dengan abana, isatabana, tabayyana, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.

⁶ *Pengertian Nusyuz dan Dalil*, <https://knowledgeisfreee.blogspot.com> (Diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 13:30)

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*). Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara, Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan, Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian, Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan,

Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.⁷

Apabila kita kaitkan hal ini terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018, menurut analisa penulis terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya, penganiayaan tersebut tidak bisa didasari oleh alasan *nusyuz*. Jika kita lihat kekerasan yang dilakukan oleh suami yang merupakan anggota militer ini menyebabkan luka gores dan memar dibagian lutut kaki kiri istrinya, yang dalam islam sendiri ini merupakan tindak kekerasan. Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh, Rasulullah pun melarang tegas adanya kekerasan.

Kekerasan fisik terbagi menjadi 2 yakni kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Adapun kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :

1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya meninggal
5. Kehilangan salah satu panca indra.
6. Mendapat cacat.

⁷ Abdul Aziz, *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, [Http://journal.uinjkt.ac.id](http://journal.uinjkt.ac.id) (Diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 14:05)

7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
10. Kematian korban.

Sedangkan kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan :

1. Cedera ringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat

Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer Palembang pada tahun 2018, terhadap perkara kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami yang dalam hal ini terdakwa merupakan anggota militer, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selam 6 (enam) bulan. Karena yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kategori kekerasan ringan berupa dorongan yang mengakibatkan istri dari terdakwa mengalami rasa sakit dan luka fisik. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 44 ayat (4) *“dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”*.

Terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dalam

hukum pidana Islam pengertian hukuman penjara menurut pendapat sebagian ulama adalah sebagai wujud dari hukuman pengasingan bagi pelaku tindak kejahatan. Mengenai batasan umur usia seseorang, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif, dalam hukum Positif batasan kedewasaan seseorang adalah apabila sudah mencapai 18 tahun dan sudah pernah kawin. Sedangkan dalam hukum Islam kedewasaan seseorang sudah mencapai 15 tahun dan sudah baligh. Para ulama sepakat membagi masa kehidupan manusia menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Masa tidak mampu berfikir, adalah masa sejak seseorang itu dilahirkan hingga ia berusia 7 tahun pada usia tersebut anak dikatakan belum *tamyiz* dan terhadapnya belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Masa mampu berfikir lemah, adalah masa sejak usia 7 tahun hingga baligh. Ukuran baligh dalam Islam ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi keluar mani bagi laki-laki. Bagi usia yang pelakunya masih tergolong masa mampu berfikir lemah apabila melakukan tindak pidana maka tidak bisa dihukum atau dipidana, melainkan diberi pengajaran saja.
3. Masa berfikir penuh, adalah sejak seseorang itu sudah mencapai masa cakap bertindak dan apabila ia melakukan kejahatan maka ia dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban.⁸

Menurut pandangan hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk

⁸ Siti Bidayatul Hidayah, 2013, *Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor. 182/Pid.B/2010/PN.YK)*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, (<http://ejournal.uin-suka.ac.id>), Hlm 473, Diterbitkan (Diakses pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:20)

dalam perbuatan jarimah yang pelakunya dapat dikenai hukuman qishas. Hukuman *qishas* adalah salah satu jenis hukuman yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah dan hakim tidak mempunyai wewenang untuk merubahnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan pelaku kekerasan adalah suami yang berusia 44 tahun, bila dikaitkan dengan poin diatas maka pelaku tergolong dalam poin ketiga, yaitu *fase mampu berfikir penuh*, dengan demikian pelaku dapat dikenai hukuman dan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *jarimah qishas*. Dalam hukuman *qishas* seorang hakim tidak mempunyai wewenang untuk merubah, menambah dan mengurangi hukuman tersebut, bukan berarti seorang hakim berpatokan pada nas semata, tetapi harus juga menggunakan ijtihad sebagai pertimbangan, mengingat penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk membalas dendam saja melainkan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku dan orang lain agar tidak terulang kembali kejahatan yang serupa.

Dengan demikian menurut pendapat penulis bahwa hukuman terhadap terdakwa tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan seorang hakim.